



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten (KP3B) Jl.Syeh
Nawawi Albantani - Serang

**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2026**

IKHTISAR

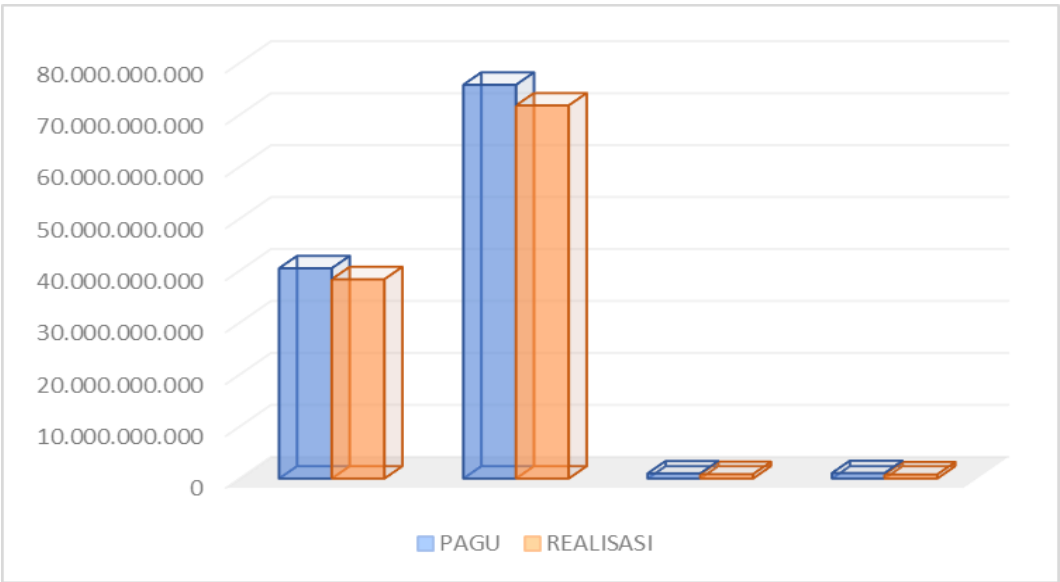
EKSEKUTIF

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2025 memiliki anggaran murni sebesar Rp. 93.043.250.000,00 dimana sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 realisasi keuangan mencapai Rp. 25.977.023.430,00 dengan prosentase capaian sebesar 31,06%.

Sementara untuk anggaran perubahan Dinas Perhubungan semula memiliki anggaran sebesar Rp. 93.043.250.000,00 menjadi Rp. 85.218.919.822atau berkurang sebesar Rp. 7.824.330.178,00 dimana pada akhir penggaran perubahan 2025 realisasi keuangan mencapai Rp. 77.190.639.579,23 dengan prosentase capaian sebesar 90,58%.

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.543.917.320	40.839.062.066,33
2	Program Penyelenggaraan LLAJ	37.646.801.430	35.520.045.153,90
3	Program Pengelolaan Pelayaran	543.674.972	393.791.248,00
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	484.526.100	437.741.111,00
		85.218.919.822	77.190.639.579,23



Dinas Perhubungan Provinsi Banten Pada Tahun 2025 memiliki 4 (empat) program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) Sub Kegiatan sebagai sarana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk Urusan Perhubungan.

Capaian Kinerja dari beberapa indicator Pada tahun 2025 ini beragam sebagaimana penjelasan di bawah ini.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat	0,70	65,00	92,86
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut	10,00	10,00	100,00
Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan Kereta Api	Cakupan Perlindungan Kereta Api yang Ditangani	100,00	100,00	100,00

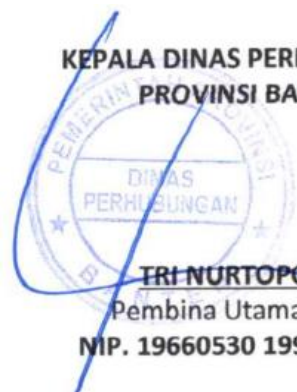
KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dengan baik.

Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan bayak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini.

Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin member saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN**

TRI NURTOPO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660530 199003 1 003

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	I-1
1.3. DASAR HUKUM	I-1
1.4. STRUKTUR ORGANISASI	I-3
1.5. ISU – ISU STRATEGIS	I-6
1.6. SISTEMATIKA PELAPORAN	I-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029	II-1
2.1.1. VISI DAN MISI	II-2
2.1.2. TUJUAN	II-2
2.1.3. SASARAN	II-3
2.1.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	II-4
2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2025 (MURNI DAN PERUBAHAN)	II-5
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (MURNI DAN PERUBAHAN)	II-11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	III-1
3.1.1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024	III-1
3.1.2. MEMBANDINGKAN ANATARA TARGET DAN REALISASI SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN BEBERAPA TAHUN LALU	III-13
3.1.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI	III-36
3.1.4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET STANDAR NASIONAL	III-37
3.1.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN PENURUNAN KINERJA	III-37
3.1.6. ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	III-39

3.1.7. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA	III-48
3.2. REALISASI ANGGARAN	III-61
 BAB IV PENUTUP	 IV-1
4.1. KESIMPULAN	IV-1
4.2. SARAN DAN REKOMENDASI	IV-2
 LAMPIRAN	
1. PERJANJIAN KINERJA	
2. SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH INSPEKTORAT	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status	I-4
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	I-5
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	I-6
Tabel 2.1. Sasaran dan target Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	II-4
Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Banten	II-4
Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2024	II-5
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Anggaran Murni Kepala Dinas Perhubungan	II-12
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Anggaran Perubahan Kepala Dinas Perhubungan	II-12
Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten	II-12
Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	II-13
Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Angkutan dan Pengembangan Transportasi	II-17
Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Angkutan Jalan	II-17
Tabel 2.10. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pengembangan	II-18
Tabel 2.11. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan	II-18
Tabel 2.12. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Prasarana Jalan	II-18
Tabel 2.13. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perlengkapan Jalan	II-19
Tabel 2.14. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas	II-19
Tabel 2.15. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	II-20
Tabel 2.16. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Bina Keselamatan Lalu Lintas	II-20
Tabel 2.17. Perjanjian Kinerja Kepala Laut Udara Dan Perkeretaapian	II-21
Tabel 2.18. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kepelabuhan Dan ASDP	II-22
Tabel 2.19. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perhubungan Udara Dan Perkeretaapian	II-22
Tabel 2.20. Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan	II-22
Tabel 2.21. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Upt Pengelolaan Prasarana Perhubungan	II-23
Tabel 2.22. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sarana Perhubungan Darat Dan Pengendalian Operasional Angkutan	II-24
Tabel 2.23. Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Banten	II-25
Tabel 2.24. Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis	II-25
Tabel 2.25. Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Banten Anggaran Perubahan Tahun 2025	II-26
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	III-1
Tabel 3.2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	III-2
Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Program Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2024	III-2
Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	III-3
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Lalu	III-14
Tabel 3.6 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Lalu	III-16
Tabel 3.7. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan Tahun	III-20

2024 dan Tahun Lalu

Tabel 3.8. Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target Renstra	III-36
Tabel 3.9. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sasaran pada Dinas Perhubungan	III-40
Tabel 3.11. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan	III-41
Table 3.12 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten	III-42
Tabel 3.13. Analisis Program Kegiatan Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja	III-49
Tabel 3.14. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	III-62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur organisasi Dinas Perhubungan	I-4
Gambar 1.2. Struktur organisasi UPTD Pengelola Prasarana Dinas Perhubungan	I-4
Gambar 1.3. Jumlah pegawai PNS berdasarkan gender	I-5
Gambar 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan status PPPK	I-5
Gambar 1.5. Jumlah pegawai berdasarkan status paruh waktu	I-6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2025 merupakan tahun ke 1 (pertama) dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029, di tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki anggaran murni sebesar Rp. 93.043.250.000,- dan anggaran perubahan sebesar Rp. 85.218.919.822,- berkurang sebesar Rp. 7.824.330.178,- atau berkurang sebanyak 8,04% dibanding dengan anggaran murni.

Dalam penyelenggaraan pekerjaan Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki 4 (empat) program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan dan pada tahun anggaran 2025 ini beberapa kegiatan dilakukan efisiensi anggaran diantaranya gaji dan tunjangan, perjalanan dinas serta beberapa kegiatan yang tidak mendukung capaian indikator kinerja utama.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Banten adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025 -2029;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang khususnya dalam perencanaan kinerja;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5025)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Syarat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

16. Peraturan Gubernur banten Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
17. Peraturan Gubernur banten Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.;
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Daerah Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

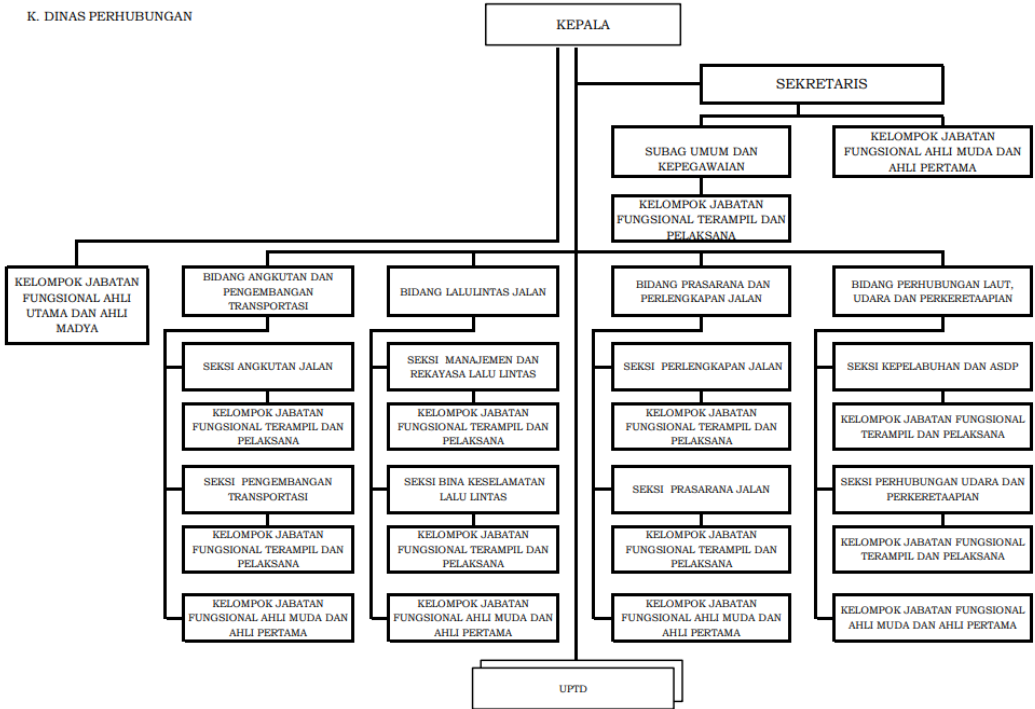
TUGAS POKOK

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

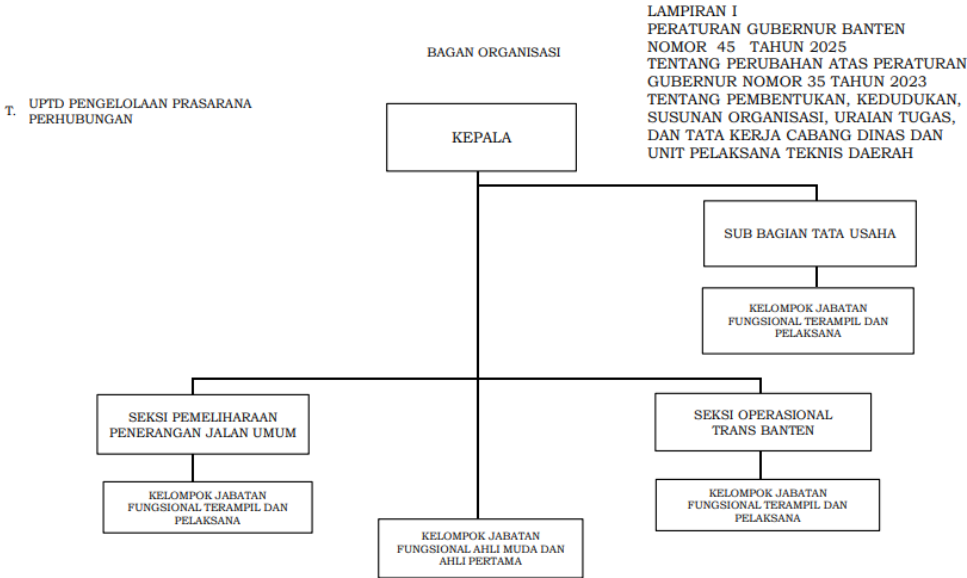
FUNGSI DAN WEWENANG

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan wewenang:

- a. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- b. Pengelolaan Pelayaran;
- c. Pengelolaan Penerbangan;
- d. Pengelolaan Perkeretaapian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undang.



Gambar 1.1. Struktur organisasi Dinas Perhubungan



Gambar 1.2. Struktur organisasi UPTD Pengelola Prasarana Dinas Perhubungan

KONDISI PEGAWAI

Berdasarkan data Kepegawaian tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten Memiliki jumlah pegawai sebanyak 332 orang dimana 90 orang bersatatus sebagai PNS, 207 orang bersatus sebagai PPPK dan 35 orang berstatus Paruh waktu.

untuk lebih jelas mengenai data jumlah pegawai Dinas Perhubungan lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Bersasarkan Status

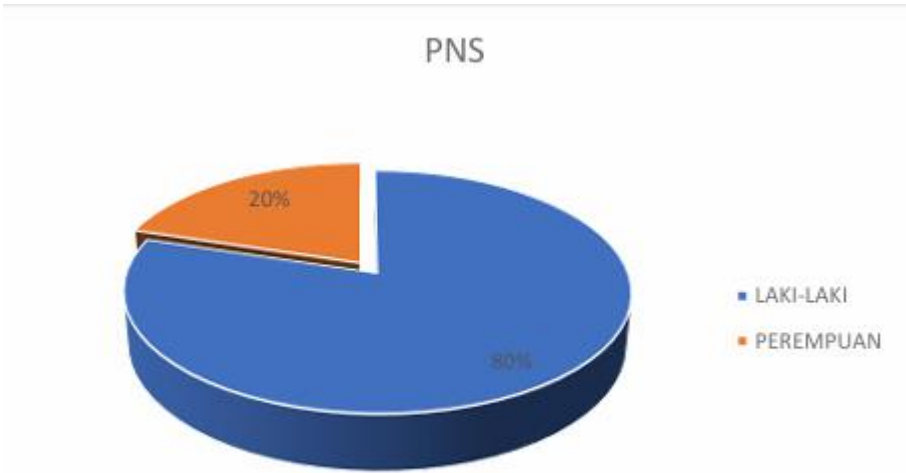
STATUS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
PNS	72	18	90
PPPK	176	31	207
Paruh Waktu	33	2	35
JUMLAH	313	51	332

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

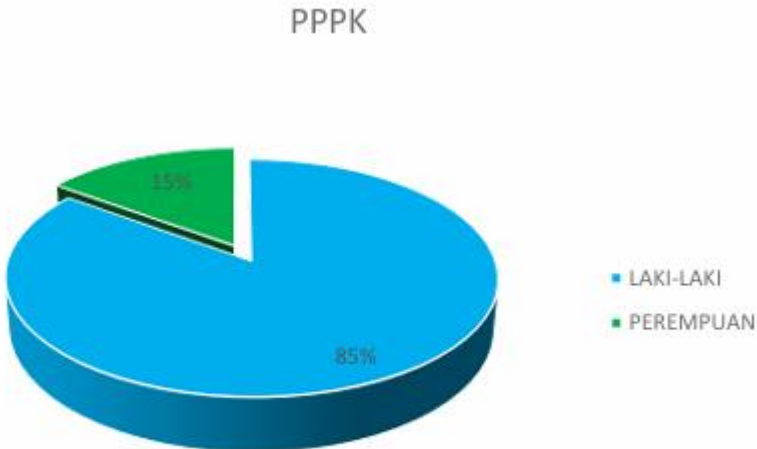
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasrkan Pendidikan

Jenjang	PNS	PPPK	Paruh Waktu	Jumlah
SD	-	-	-	-
SMP	-	-	-	4
SMA	22	130	33	185
DIPLOMA	4	11	0	15
S.1	39	85	2	123
S.2	2	0	0	2
JUMLAH	67	226	39	332

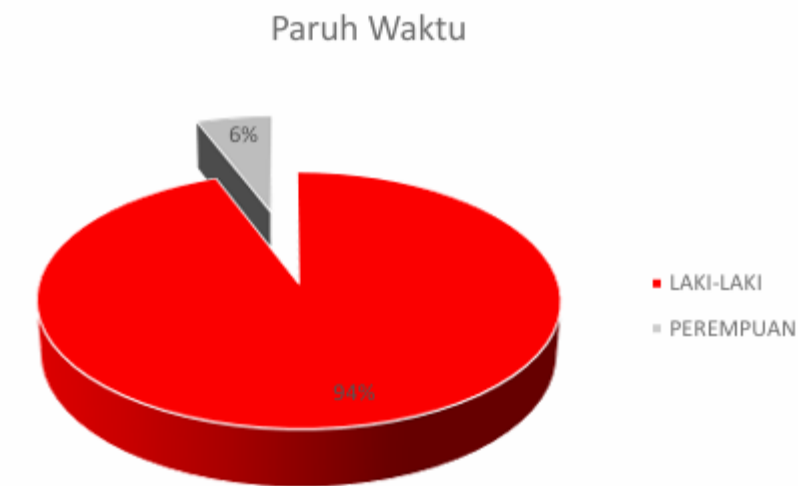
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten



Gambar 1.3. Jumlah pegawai PNS berdasarkan gender



Gambar 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan status PPPK



Gambar 1.5. Jumlah pegawai berdasarkan status paruh waktu

1.5. ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 memiliki isu strategis sebagaimana berikut:

1. Kurangnya integrasi antar berbagai moda transportasi (misalnya, bus, kereta api, dan transportasi online) menyulitkan mobilitas masyarakat;
2. Kerusakan jalan, terbatasnya jumlah halte, dan kondisi fasilitas transportasi umum yang kurang memadai dapat mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik;
3. Biaya transportasi yang tinggi, terutama untuk transportasi jarak jauh, dapat menjadi beban bagi masyarakat;
4. Pengembangan sarana angkutan umum masal yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan;
5. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di perkotaan Serang Metropolitan Area (SMA);
6. Pembangunan Terminal Tipe-B;
7. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional;
8. Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Banten dan peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.



1.6. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini terdiri dari Latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, tugas dan fungsi, Proses Bisnis sampai evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja serta menyajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

BAB ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

Renstra adalah singkatan dari Rencana Strategis. Ini adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil dan berisi strategi atau arahan untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi. Dokumen ini biasanya berlaku untuk periode 5 (lima) tahun, dalam skala Pemerintahan daerah dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada Tahun 2025 - 2029 Provinsi Banten Telah memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur yang mana berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum pada Pasal 65 ayat 1 berbunyi Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Berdasarkan hal tersebut maka Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 agar Gubernur memerintahkan kepala perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 -2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi. Dengan adanya instruksi di atas maka Dinas Perhubungan Provinsi Banten menyusun Renstra tahun 2025 – 2029 dengan mengusung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.



2.1.1. VISI DAN MISI

Dalam penyelenggaraan pekerjaan Dinas Perhubungan Provinsi Banten mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi Banten yaitu:

“BANTEN MAJU, ADIL MERATA TIDAK KORUPSI”

Adapun Misi dari Pemerintah Provinsi Banten adalah:

- 1. Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila Dan Demokratis Berlandaskan Iman Dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, Dan Tangguh;
- 2. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial;
- 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif;
- 4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas;
- 5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik Dan Resiliensi Terhadap Bencana..

berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten mengemban **Misi 4** yaitu “**Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas**”

2.1.2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provins Banten Tahun 2026-2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan keselarasan perencanaan sektoral dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, serta mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029.
- 2. Menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perencanaan pembangunan daerah
- 3. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2025 2029;
- 4. Menjadi dasar perencanaan tahunan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi.

5. Menetapkan kebijakan strategis jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
6. Menentukan strategi untuk pencapaian keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi..

2.13. SASARAN

Berdasarkan pengertian secara umum Kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi yang memiliki karakteristik serupa dan menjadi target utama dari suatu program, dalam hal ini yang menjadi sasaran adalah masyarakat pengguna transportasi. Adapun layanan yang diberikan Dinas Perhubungan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Jaringan Pelayanan Angkutan Umum Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten jumlah trayek yang disediakan sebanyak 164 trayek.
2. Fasilitas Perlengkapan Jalan Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16Huk/2023 tentang Penetapan Status, Fungsi, dan Kelas Jalan Provinsi Banten dan Penetapan Fungsi Ruas Jalan/Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Banten Di Luar Arteri Primer dan Kolektor Primer jumlah ruas jalan Provinsi Banten sebanyak 93 ruas jalan dimana hampir semua ruas jalan telah terpasang.
3. Sosialisasi Pelajar Pelopor Sosialisasi pelopor merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelajar tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas, serta mendorong mereka menjadi agen perubahan yang mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Banten selalu melaksanakan kegiatan pelajar pelopor dari tingkat SD sampai dengan SMA.
4. Rekomendasi Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas Merupakan sebuah keputusan Kepala Dinas Perhubungan yang diterbitkan sebagai salah satu syarat dalam perizin pembangunan usaha.
5. Pembinaan Keselamatan Pelayaran Kegiatan pembinaan keselamatan pelayaran sering dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten dengan cara melakukan pembinaan terhadap operator kapal.



6. Pos Perlintasan Kereta Api Di Jalan Provinsi Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki 8 (delapan) Pos Perlintas yang dilalui Jalan Berstatus Provinsi, semua perlintasa ini dibangun untuk membrikan keamanan dan keselamatan pada perlintasan sebidang Kereta Api.

Tabel 2.1. Sasaran dan target Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat	0,70
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut	10,00
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

2.1.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Setiap strategi bisa untuk satu atau beberapa sasaran atau sebaliknya satu sasaran menggunakan beberapa strategi. Strategi memiliki parameter keberhasilan dan kegagalan yang berupa capaian indikator kinerja, pengelolaan kapasitas birokrasi, sistem manajemen atau implementasi teknologi. Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Penigkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
2	Penetapan kebijakan penyelenggaraan perhubungan	
3	Peningkatan kualitas perlengkapan jalan perhubungan	
4	Optimalisasi kinerja jaringan pelayanan angkutan umum	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	
6	Peningkatan keselamatan dan koordinasi pelayaran angkutan laut	Peningkatan Pengelolaan Pelayaran
7	Peningkatan pengeloaan perkeretaapian	Peningkatan Pengelolaan Perkeretaapian

Sumber: Renstra 2025 – 2029 Dinas Perhubungan

PROGRAM

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki 4 (Empat) program prioritas untuk sebagai turunan srtategi dan kebijakan, dimana 4 program prioritas itu berupa:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- 3. Program pengelolaan perkeretaapian;
- 4. Program pengelolaan pelayaran;

2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten mengacu pada dokumen Renstra Perubahan 2025 – 2029 dengan memperhatikan Cascading yang dimulai dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sehingga menghasilkan Program dan Kegiatan.

Berdasarkan Dokuemen Renstra 2025 – 2029 Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2025 memiliki 4 (empat) program, 23 (Dua puluh tiga) kegiatan dan 64 (Enam puluh empat) sub kegiatan. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3.Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2025

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
INDUK		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1)	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN
9)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
11)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
13)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
14)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
16)	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
5)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah
17)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
18)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
19)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
20)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
21)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
22)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
23)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
24)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
25)	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
26)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
7)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
27)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
28)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
8)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
29)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
30)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
31)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
32)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan
9)	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
33)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provins
34)	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
10)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan DI Jalan Provinsi
35)	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun
36)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia
37)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara
38)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara
11)	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
39)	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
12)	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Persentase pelaksanaan MRLl dan penyediaan, pemeliharaan jalan
40)	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
41)	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
42)	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	umlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
43)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	umlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan
13)	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
44)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
45)	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi
14)	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
46)	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kopetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi Banten	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
47)	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Managemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
48)	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun
49)	Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (Zoss)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi
50)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
15)	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
51)	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
52)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
C	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan
16)	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi Banten



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
53)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
17)	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
54)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian
D	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian
18)	Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Presentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi
55)	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN (UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN)	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
19)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)
55)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
56)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
57)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
58)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
59)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
21)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
60)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
61)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
22)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
62)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
63)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi
23)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
64)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk penugasan dari pimpinan lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan indikator kinerja.

Untuk lebih jelas mengenai Perjanjian Kinerja pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Anggaran Murni Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningaktnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaran Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah)	Nilai	70-80
2	Meningkatya Kinerja Pelayanan, Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Keselamatan Perhubungan	Ratio Konektivitas	Persen	0,74
		Ratio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	19,30
		Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	84

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Anggaran Perubahan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan, Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Keselamatan Perhubungan	Ratio Konektivitas	Rasio	0,70
2	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi laut	Konektivitas laut	Unit	10,00
3	Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani	Persentase	100,00

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	Persen	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	Dokumen	3
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	Dokumen	1
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	Dokumen	1
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	Dokumen	1
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	Dokumen	1
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Laporan	3	Laporan	5



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	Laporan	8
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	96	Orang/ Bulan	97
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Dokumen	12
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	Dokumen	12
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Laporan	1
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	Dokumen	1
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Laporan	18	Laporan	18



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	Laporan	1
15	Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	Laporan	1
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	20	orang	10
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Paket	1
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	Paket	10
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	Paket	3
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	Paket	3
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Laporan	12
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	Dokumen	1
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	1



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	Unit	2
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	Paket	1
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	29	unit	29
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	Laporan	12
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Laporan	12
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	45	unit	45
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	Unit	30



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	110	Unit	110
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	Unit	4

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Angkutan dan Pengembangan Transportasi

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan	Persen	50	Persen	50
		Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan masal	Persen	40	Persen	40

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Angkutan Jalan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provins	laporan	3	laporan	3
2	Tersedianya Angkutan Umum Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam	Unit	100	Unit	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
		1 (Satu) Daerah Provinsi				

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pengembangan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	2	Dokumen	1
2	Ditetapkannya kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provins	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	2	Dokumen	1

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.10. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi	Persen	50	Persen	50

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.11. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Prasarana Jalan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Terbangunan Prasarana Jalan di Jalan Provins	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	unit	9	Unit	9
2	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	unit	10	Unit	8



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
3	Tersusunnya rencana Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	2	Dokumen	1

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.12. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perlengkapan Jalan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	unit	1330	unit	1330

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.13. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelaksanaan MRLL dan penyediaan, pemeliharaan jalan	Persen	100	Persen	100
		Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan	Persen	100	Persen	100
		Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	Persen	20	Persen	20

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten



Tabel 2.14. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	1	Dokumen	1
2	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	4	Laporan	4
3	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	1	Laporan	1
4	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	unit	400	unit	300
5	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	1	Laporan	1
6	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	1	Laporan	1

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.15. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Bina Keselamatan Lalu Lintas

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan	Laporan	1	Laporan	1



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
	Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provins				
2	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	1	Laporan	1
3	Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	unit	1	unit	1
4	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Dokumen	1	Dokumen	1
5	Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Lokasi	15	Lokasi	15

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.16. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Laut Udara Dan Perkeretaapian

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	Persen	100	Persen	100
		Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	Persen	100	Persen	100
2		Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	Persen	100	Persen	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten



Tabel 2.17. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kepelabuhan Dan ASDP

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provins	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan	3	Laporan	3
2	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	unit	1	unit	1

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.18. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perhubungan Udara Dan Perkeretaapian

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Jaringan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	5	Dokumen	4

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.19. Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Provinsi	Persen	100	Persen	100
2	Terlaksanannya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan	Persen	100	Persen	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
	Angkutan Jalan (LLAJ)	prasarana transportasi				

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.20. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Upt Pengelolaan

Prasarana Perhubungan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Paket	12
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	Paket	1
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	4	Paket	12
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	Laporan	1
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	Unit	1
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Laporan	12
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	11	Laporan	11



NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	Unit	9
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	26	Unit	26

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.21. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sarana Perhubungan Darat Dan Pengendalian Operasional Angkutan UPTD Prasarana Perhubungan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	unit	90	unit	90

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

ANGGARAN

Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2025 memiliki anggaran murni sebesar Rp. 93.043.250.000,00 dimana sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 realisasi keuangan mencapai Rp. 25.977.023.430,00 dengan prosentase capaian sebesar 31,06%.

Sementara untuk anggaran perubahan Dinas Perhubungan semula memiliki anggaran sebesar Rp. 93.043.250.000,00 menjadi Rp. 85.218.919.822atau berkurang sebesar Rp. 7.824.330.178,00 dimana pada akhir penggaran perubahan 2025 realisasi keuangan mencapai Rp. 77.190.639.579,23 dengan prosentase capaian sebesar 90,58%.

TARGET BELANJA

Pada anggaran perubahan tahun 2025 memiliki target belanja terbagi kedalam beberpa jenis sebagaimana tabel di bawah ini.



Tabel 2.22. Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-
I	Retribusi Daerah	-	-
B	BELANJA DAERAH		
I	Belanja Operasi	67.671.557.700	59.981.719.522
1	Belanja Pegawai	25.371.400.000	26.796.390.000
2	Belanja Barang dan Jasa	42.300.157.700	33.185.329.522
II	BELANJA MODAL	25.371.692.300	25.237.200.300
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.116.257.100	8.981.765.100
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	564.123.200	564.123.200
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.691.312.000	15.691.312.000
Jumlah Belanja Daerah		93.043.250.000	85.218.919.822

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Banten

ALOKASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Banten mengalokasikan anggaran berdasarkan capaian dan sasaran strategis sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.23. Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRTEGIS	ANGGARAN	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Meningaktnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaran Pemerinta	40.484.657.100	34,21	-
2	Meningkatya Kinerja Pelayanan, Penyediaan Sarana, Prasarana dan Keselamatan Perhubungan	77.860.583.280	65,79	-

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten



Tabel 2.24. Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Banten Anggaran Murni dan
Perubahan Tahun 2025

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN	93,043,250,000	85,218,919,822
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN (INDUK)	87,484,574,000	79,770,420,822
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	45,037,383,000	42,105,302,120
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	520,000,000	365,175,770
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150,000,000	52,984,770
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000	5,505,000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,000,000	5,505,000
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,000,000	5,505,000
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10,000,000	5,505,000
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	210,000,000	205,200,000
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120,000,000	84,971,000
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26,317,643,000	27,720,193,000
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,297,000,000	26,721,990,000
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	885,950,000	885,950,000
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	85,445,000	63,005,000
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	798,000	798,000
5.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	19,100,000	19,100,000
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25,464,000	25,464,000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN
7.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,886,000	3,886,000
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50,000,000	30,100,000
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50,000,000	30,100,000
4.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150,000,000	75,000,000
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150,000,000	75,000,000
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	732,516,000	617,516,000
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000	50,000,000
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220,000,000	220,000,000
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,000,000	100,000,000
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72,820,000	72,820,000
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210,000,000	105,000,000
6.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29,696,000	29,696,000
7.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50,000,000	40,000,000
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,220,304,000	3,105,916,000
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,550,000,000	2,550,000,000
2.	Pengadaan Meubel	350,000,000	350,000,000
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	320,304,000	205,916,000
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,900,000,000	8,044,481,350
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,900,000,000	900,000,000
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10,000,000,000	7,144,481,350
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	2,146,920,000	2,146,920,000
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	500,000,000	500,000,000
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,046,920,000	1,046,920,000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000	100,000,000
4.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500,000,000	500,000,000
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	40,881,048,630	36,636,917,630
1.	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	400,000,000	216,304,000
1.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	200,000,000	120,388,000
2.	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	200,000,000	95,916,000
2.	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi	27,681,587,500	25,977,560,372
1.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	2,850,000,000	2,678,146,000
2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	23,631,587,500	22,560,248,000
3.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	500,000,000	305,130,000
4.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	700,000,000	434,036,372
3.	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	345,936,630	90,330,630
1.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	345,936,630	90,330,630
4.	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	5,330,755,000	3,831,360,128
1.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	10,000,000	4,000,000
2.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	2,500,000,000	1,977,725,128
3.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	10,000,000	50,000
4.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2,810,755,000	1,849,585,000
5.	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	20,000,000	15,560,000
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10,000,000	10,000,000
2.	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	10,000,000	5,560,000
6.	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	4,818,412,500	4,502,880,500
1.	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan	5,000,000	5,000,000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN
	Kopetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi Banten		
2.	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Managemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5,000,000	5,000,000
3.	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	300,000,000	40,053,000
4.	Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (Zoss)	5,000,000	5,000,000
5.	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4,503,412,500	4,447,827,500
7.	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2,284,357,000	2,002,922,000
1.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	2,254,357,000	2,000,752,000
2.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30,000,000	2,170,000
C.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	841,512,000	543,674,972
1.	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	500,000,000	297,387,472
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	500,000,000	297,387,472
2.	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	341,512,000	246,287,500
1.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	341,512,000	246,287,500
D.	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	724,630,370	484,526,100
1.	Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	724,630,370	484,526,100
1.	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	724,630,370	484,526,100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	5,558,676,000	5,448,499,000
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4,526,158,000	4,486,092,000
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	133,618,000	106,032,000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10,130,000	10,130,000
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000	50,000,000
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000	15,000,000
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58,488,000	30,902,000
2.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	426,906,000	426,906,000
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	426,906,000	426,906,000
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,765,978,000	3,757,078,000
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,684,978,000	3,684,978,000
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81,000,000	72,100,000
4.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	199,656,000	196,076,000
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177,890,000	174,310,000
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,766,000	21,766,000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1,032,518,000	962,407,000
1.	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1,032,518,000	962,407,000
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1,032,518,000	962,407,000
	JUMLAH	93,043,250,000	85,218,919,822

Sumber: DPA dan DPAP Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pada tahun 2025 Dinas perhubungan Provinsi Banten akan melaksanakan evaluasi penilaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun baik di level Gubernur dengan Kepala Dinas, Kepala Dinas dengan Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon IV. Pengukuran evaluasi kinerja ini akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan melakukan evaluasi kinerja ini diharapkan beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun ini akan dapat teratasi untuk tahun berikutnya. berikut adalah skala nilai dari peringkat kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91≤100	Sangat Tinggi
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil evaluasi internal Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2025 beberapa Capaian Indikator Kinerja Utama telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Dokumen Renstra 2025 – 2029.

3.1.1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Untuk lebih jelas mengenai realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat	0,70	71,00	10.142,86
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut	10,00	10,00	100,00
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Program Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
INDUK				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	100,97	100,97
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100,00	93,67	93,67
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran	100,00	87,05	87,05
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian	100,00	64,00	64,00
UPTD				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100,00	98,43	98,43
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100,00	95,80	95,80

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
INDUK							
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
2.15.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	3,00	3,00	100,00
2.15.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1,00	1,00	100,00
2.15.01.1.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1,00	1,00	100,00
2.15.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1,00	1,00	100,00
2.15.01.1.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1,00	1,00	100,00
2.15.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Laporan)	Laporan	3,00	3,00	100,00

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.15.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	6,00	6,00	100,00
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2.15.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	Orang/Bulan	96,00	96,00	100,00
2.15.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	12,00	12,00	100,00
2.15.01.1.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Dokumen	12,00	12,00	100,00
2.15.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Laporan	1,00	1,00	100,00
2.15.01.1.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Dokumen	1,00	1,00	100,00
2.15.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan	18,00	18,00	100,00

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.15.01.1.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Dokumen	1,00	1,00	100,00
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
2.15.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan	1,00	1,00	100,00
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2.15.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Orang	10,00	10,00	100,00
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2.15.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1,00	1,00	100,00
2.15.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	10,00	10,00	100,00
2.15.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	3,00	3,00	100,00
2.15.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	3,00	3,00	100,00

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.15.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	12,00	12,00	100,00
2.15.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	1,00	1,00	100,00
2.15.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	1,00	1,00	100,00
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2.15.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Unit	2,00	2,00	100,00
2.15.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Paket	1,00	1,00	100,00
2.15.01.1.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	25,00	25,00	100,00
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.15.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	12,00	12,00	100,00

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				
2.15.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12,00	12,00	100,00
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.15.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	45,00	45,00	100,00
2.15.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	30,00	30,00	100,00
2.15.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	110,00	108,00	98,18
2.15.01.1.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	4,00	6,00	150,00
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan Persentase Ketercapaian Kegiatan Persentase pelaksanaan MRLL				
2.15.02.1.05.0004		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	Laporan	4,00	4,00	100,00

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Laporan)				
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan Persentase Ketercapaian Kegiatan Persentase pelaksanaan MRLL				
2.15.02.1.05.0001		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	Laporan	1,00	1,00	100,00
2.15.02.1.05.0005		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	Laporan	1,00	1,00	100,00
2.15.02.1.05.0007		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan (Unit)	Unit	300,00	300,00	100,00
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi				
2.15.02.1.06.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	Laporan	1,00	1,00	100,00
2.15.02.1.06.0004		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	Laporan	1,00	1,00	100,00

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Persentase Ketercapaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				
2.15.02.1.02.0001		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun (Unit)	Unit	9,00	9,00	100,00
2.15.02.1.02.0002		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	Unit	1.330,00	1.330,00	100,00
2.15.02.1.02.0003		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	Unit	8,00	8,00	100,00
2.15.02.1.02.0004		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	Unit	62,00	62,00	100,00
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				
2.15.02.1.03.0001		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)	Dokumen	1,00	1,00	100,00
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provin				
2.15.02.1.01.0001		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Dokumen)	Dokumen	1,00	1,00	100,00
2.15.02.1.01.0002		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Dokumen)	Dokumen	1,00	0,00	0,00
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase Ketercapaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.15.02.1.07.0004		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)	Laporan	1,00	1,00	100,00
2.15.02.1.07.0005		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	Laporan	1,00	1,00	100,00
2.15.02.1.07.0007		Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	Unit	1,00	0,00	0,00
2.15.02.1.07.0008							
2.15.02.1.07.0011		Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Lokasi)	Lokasi	15,00	15,00	100,00
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
2.15.02.1.08.0002		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	1	3,00	3,00	100,00
2.15.02.1.08.0003		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	Unit	100,00	100,00	100,00

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)				
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				
2.15.03.1.09.0001		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian (Unit)	Unit	1,00	1,00	100,00
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi				
2.15.03.1.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi (Laporan)	Laporan	3,00	3,00	100,00
2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		Presentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi				
2.15.05.1.06.0001		Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan	Dokumen	4,00	4,00	100,00

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan (Dokumen)				

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Banten

**3.1.2. MEMBANDINGKAN ANATARA TARGET DAN REALISASI SERTA CAPAIAN KINERJA
TAHUN INI DENGAN BEBERAPA TAHUN LALU**

Dalam perbandingan data realisasi kinerja terdapat beberapa perbedaan sarana dan indikator kinerja pada tahun 2023 sampai dengan 2026 dengan sasaran kinerja pada tahun 2025, hal ini bisa terjadi karena perbedaan masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah selsai yaitu tahun 2021 – 2023.

Pada tahun 2024 Provinsi Baneten telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana RPD ini di susun berdasarkan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023 atau 2024 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

dengan adanya transisi dari RPJMD menjadi RPD akan berdampak pada perbedaan sasaran dan indikator kinerja.

Untuk capaian kinrja pada tahun 2025 yaitu:

- 1. Rasio Konektifitas Darat target 70,00, realiasi 65,00, capaian 92,86
- 2. Rasio Konektifitas Laut target 10,00, realiasi 10,00 capaian 100,00
- 3. Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani target 100,00 , realiasi 100,00, capaian 100,00

Untuk melihat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2022, 2023 & 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2022	2023	2024	2022	2023	2024			2024	2024	2024	2025	2025	2025
Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	85,00	69,77	73,16	85,00	80,00	76,20	Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat	-	-	-	70,00	65,00	92,86
Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	-	-	-	-	-	-	Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut	-	-	-	10,00	10,00	100,00
	Prosentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara	100,00	80,00	-	100,00	80,00	-	Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan Kereta Api	Cakupan Perlindungan Kereta Api yang Ditangani	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	20,00	21,00	21,00	20,00	21,00	24,72								

Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2022	2023	2024	2022	2023	2024			2024	2024	2024	2025	2025	2025
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi	-	-	70,00	-	-	70,00								
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	-	-	80,00	-	-	86,17								

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 3.6 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program Tahun 2025 dengan Tahun 2022, 2023 & 2024

Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian			Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024			2025	2025	2025
INDUK															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,00	100,00	100,00	98,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	100,97	100,97
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	88,00	100,00	100,00	88,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan	100,00	93,67	93,67
												Persentase pelaksanaan MRL dan penyediaan, pemeliharaan jalan	100,00	86,08	86,08

Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian			Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024			2025	2025	2025
												Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi	50,00	56,76	113,52
												persentase perencanaan transportasi yang diterapkan	50,00	85,65	171,30
												Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	20,00	6,69	33,45

Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian			Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024			2025	2025	2025
												Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal	40,00	29,04	72,60
Program Pengeolaan Pelayaran	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pengeolaan Pelayaran	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	100,00	87,05	87,05
												Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran	100,00	97,30	97,30
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian	100,00	64,00	64,00

Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian			Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024			2025	2025	2025
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100,00	98,43	98,43
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	86,00	100,00	100,00	86,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	75,00	95,80	127,73

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 3.7. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Tahun 2024

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2024	2024			2025	2025	2025
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100%	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	100%	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2024	2024			2025	2025	2025
	Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	8	100%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97	97	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96	96	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100%	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100%	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrgt	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2024	2024			2025	2025	2025
	Kuangan Akhir Tahun SKPD					Kuangan Akhir Tahun SKPD			
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100%	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	18	18	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	18	18	100%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100%	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100%	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi	100%	100%	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi	100%	100%	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2024	2024			2025	2025	2025
	Kepegawaian Perangkat Daerah					Kepegawaian Perangkat Daerah			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	76	76	100%	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	10	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100%	100%	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100%	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	14	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	3	3	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2024	2024			2025	2025	2025
-	-	-	-	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100%
-	-	-	-	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	15	100%	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2	100%
-	-	-	-	-	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	1	1	100%
-	-	-	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	25	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa	100	100	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa	100	100	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2024	2024			2025	2025	2025
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	87,35	87,35%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	112,05	112,05 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65	62	95%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45	45	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74	74	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	30	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2024	2024			2025	2025	2025
					Operasional atau Lapangan				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	2	67%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110	108	98%
-	-	-	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	6	150%
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100%	100%	100%	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100%	50%	50%
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	1	100%	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	1	100%
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provins	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	1	100%	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provins	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	0	0%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan	75%	75%	100%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan	100%	100%	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2024	2024			2025	2025	2025
	Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provins	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	28	28	100%	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provins	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	9	9	100%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	1860	1860	100%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	1330	1330	100%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	14	14	100%	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	8	8	100%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	230	230	100%	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	62	62	100%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	100%	100%	100%	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	100%	100%	100%
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1	1	100%	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1	1	100%
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	100%	55,85%	55,85%	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	100%	55,85%	55,85%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2024	2024			2025	2025	2025
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	7	5	71%	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	4	4	100%
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4	3	75%	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1	1	100%
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1	0	0%	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1	1	100%
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	217	167	77%	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	300	300	100%
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	75,00%	75,00%	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	60,00%	60,00%
Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan	1	1	100%	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan	1	1	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2024	2024			2025	2025	2025
	terhadap implementasi batas kecepatan				Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi			
Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	19	19	100%	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	1	100%
Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	20	20	100%	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	1	0	0%
-	-	-	-	-	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	15	15	100%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	100%	100%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	2	2	100%	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan	3	3	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2024	2024			2025	2025	2025
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			
-	-	-	-	-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100	100	100%
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar	100%	100%	100%	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar	100%	100%	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	3	3	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	3	3	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2024	2024			2025	2025	2025
	Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provins	Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi			
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar	100	100	100%	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar	100	100	100%
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1	1	100%	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1	1	100%
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	100%	100%	100%	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	100%	100%	100%
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan	5	5	100%	Perumusan Kebijakan	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan	4	4	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2024	2024			2025	2025	2025
Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan				Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan			
UPTD PENGELOLAAN BAHAN PERENCANAAN									
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	100	100	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	100	100	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kanto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100%	Penyediaan Bahan Logistik Kanto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100%
-	-	-	-	-	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2024	2024			2025	2025	2025
					Perlengkapan Kantor				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100%
-	-	-	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	100	100	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	100	100	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%
-	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	11	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2024	2024			2025	2025	2025
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (UPTD)	100%	86,00%	86,00%	-	-	-	-	-
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan	100	86,00	86%	-	-	-	-	-
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar	100	100	100%	-	-	-	-	-
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan	2	2	100%	-	-	-	-	-

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2024	2024	2024			2025	2025	2025
	Pembangunan dan Pengoperasian								
-	-	-	-	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100	100	100%
-	-	-	-	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	90	90	100%

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

3.1.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET KINERJA
JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2025 dengan target pada renstra tahun 2025 – 2029 ada realisasi melebihi target capaian, hal ini terjadi karena realisasi dari indikator kinerha melebihi target yang di usulkan. Sementara untuk capain indikator lainnya sesuai dengan target yang telah disusun.

Tabel 3.8. Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2024		Target Renstra 2024
						Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Rasio Konektifitas Darat	Program Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraa n angkutan	Persentase	100,00	93,67	100%
				Persentase pelaksanaan MRLL dan penyediaan, pemeliharaaan jalan	Persentase	100,00	86,08	100%
				Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi	Persentase	50,00	56,76	100%
				persentase perencanaan transportasi yang diterapkan	Persentase	50,00	85,65	100%
				Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	Persentase	20,00	6,69	100%
				Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal	Persentase	40,00	29,04	100%
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	Persentase	100,00	87,05	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2024		Target Renstra 2024
						Target	Realisasi	
				Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran	Persentase	100,00	97,30	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100,00	64,00	100%

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

3.1.4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET STANDAR NASIONAL

Pada tahun anggaran 2025 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Banten tidak memiliki program atau kegiatan yang mendukung indikator makro sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran atau perbandingan kinerja dengan Standar Nasional.

3.1.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN PENURUNAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi internal Dinas Perhubungan Provinsi Banten telah diketahui sejauh mana kegagalan dan keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, dengan diketahuinya keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan maka perlu diambil langkah – langkah antisipatif serta strategi dalam menanggulangi permasalahan yang ada sehingga permasalahan tersebut dapat diantisipasi di kemudian hari.

Untuk lebih jelas mengenai penyebab keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

1. Capaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Darat memiliki indikator berupa Capaian Rasio Konektivitas Darat dengan capaian pada dokumen berdasarkan hasil evaluasi internal hasil penilaian Rasio Konektivitas Darat Dinas Perhubungan Provinsi Banten adalah 65,00 dimana capaian 92,86 dari target yang ditentukan sebesar 70,00. dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{65,00}{70,00} \times 100 = 92,86$$

2. **Capaian Sasaran 2 Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Laut**

Capaian sasaran 2 merupakan pengukuran rasio Konektivitas Laut dimana hal ini mengukur konektivitas Angka kecelakaan pelayaran yang dihitung adalah daerah yang operator kapal perairan rakyat yang diberikan pembinaan keselamatan pelayaran. Berdasarkan hasil evaluasi internal hasil penilaian Konektivitas Laut Dinas Perhubungan Provinsi Banten adalah 10,00 dimana capaian 10,00 dari target yang ditentukan sebesar 100,00.

untuk lebih jelas mengenai penghitungan Rasio Konektivitas Laut dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

= jumlah angka kecelakaan Kapal setelah pembinaan keselamatan pelayaran pada tahun N

$$\frac{10}{10} \times 100 = 100$$

➤ **Capaian Sasaran 3 Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan Kereta Api**

berdasarkan dari hasil pengukutan internal untuk sasaran capaian 3 Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan Kereta Api Dinas Perhubungan adalah 100 dari target nilai 100 dengan capaian sebesar 100%

$$\frac{100}{100} \times 100 = 100,00$$

Analisis dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah kerja, capaian kinerja pada tiga sasaran utama menunjukkan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung pada sektor yang bersangkutan.

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi darat**

Indikator kinerja yang digunakan untuk menilai capaian sektor transportasi darat adalah Rasio Konektivitas Darat, dengan target yang ditetapkan sebesar 70,00. Berdasarkan evaluasi, realisasi capaian mencapai 65,00, atau sekitar 92,86% dari target. Analisis lebih mendalam mengungkapkan bahwa dari tiga koridor yang direncanakan, baru satu koridor yang berhasil direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh upaya efisiensi anggaran yang diterapkan serta sifat kegiatan yang masih bersifat uji coba. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program yang memerlukan koordinasi lebih intensif antar instansi terkait. Oleh karena itu, untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan sinergi, komunikasi, dan perencanaan bersama antar pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi laut

Sektor transportasi laut menunjukkan capaian yang optimal. Indikator kinerja yang digunakan adalah Konektivitas Laut, dengan target sebesar 10,00. Hasil evaluasi menunjukkan realisasi capaian sama persis dengan target, yaitu 10,00, atau 100% dari target yang direncanakan. Pencapaian ini menandakan bahwa seluruh rencana program transportasi laut telah berjalan sesuai dengan jadwal dan standar operasional yang berlaku. Tidak terdapat kendala signifikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak diperlukan langkah korektif tambahan. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program di sektor transportasi laut, serta konsistensi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendukung.

3. Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api

Capaian sektor pengelolaan perlintasan kereta api juga menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Indikator kinerja yang digunakan adalah Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani, dengan target 100,00. Realisasi capaian mencapai 100,00, atau 100% dari target. Hal ini menegaskan bahwa seluruh perlintasan kereta api telah dikelola secara optimal, tanpa adanya hambatan yang memerlukan intervensi tambahan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas koordinasi antar unit kerja, pengelolaan sumber daya yang tepat, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik pada sektor transportasi laut dan pengelolaan perlintasan kereta api. Sementara itu, sektor transportasi darat masih memerlukan perhatian lebih, khususnya terkait koordinasi antar instansi, percepatan realisasi koridor yang belum terealisasi, dan optimalisasi anggaran. Dengan langkah-langkah tindak lanjut yang tepat, diharapkan seluruh sasaran program transportasi dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga pelayanan transportasi di wilayah kerja dapat meningkat secara signifikan.

3.1.6. ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan didukung dengan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana dalam pelaksanaannya perlu dilakukan analisis kebutuhan sehingga dapat memilih kebutuhan prioritas dan menghindari penggunaan anggaran yang mubazir dan memenuhi azas efektif dan efisien.

Tabel 3.19. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sasaran pada Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.543.917.320	35.220.505.967	75,67
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat	Rasio	70,00	65,00	92,86	Program Penyelenggaraan Lalau Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	37.646.801.430	4.676.402.073	12,42
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut	Unit	10,00	10,00	100,00	Program Pengelolaan Pelayaran	543.674.972	346.831.590	63,79
4	Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Persentase	100,00	100,00	100,00	Program Pengelolaan Perkeretaapian	484.526.100	67.442.410	13,92
Tingkat Efisiensi										52,70
Tingkat Efektifitas										211,40

Sumber Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Untuk tingkat efektifitas dan efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11. Tingakt Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.543.917.320	35.220.505.967	75,67
Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat	Rasio	70,00	65,00	92,86	Program Penyelenggaraan Lalau Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	37.646.801.430	4.676.402.073	12,42
Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut	Unit	10,00	10,00	100,00	Program Pengelolaan Pelayaran	543.674.972	346.831.590	63,79
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Persentase	100,00	100,00	100,00	Program Pengelolaan Perkeretaapian	484.526.100	67.442.410	13,92

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Table 3.12 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Perhubngan Provinsi Banten

Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisisnsi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
DINAS PERHUBUNGAN			100	97,17	97,17	85.218.919.822	77.189.139.578	90,58	9,42%
INDUK			100	94,34	94,34	79.770.420.822	72.500.917.944	90,89	9,11%
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	101,51	101,51	42.057.825.320	37.049.697.625	88,09	11,91%
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	365.175.770	287.537.510	78,74	21,26%
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100	100	100	27.720.193.000	23.446.736.840	84,58	15,42%
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	30.100.000	20.675.790	68,69	31,31%
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	75.000.000	74.974.710	99,97	0,03%

2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	617.516.000	546.677.927	88,53	11,47%
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	3.105.916.000	3.027.120.081	97,46	2,54%
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	7.997.004.550	7.592.420.957	94,94	5,06%
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	112,05	112,05	2.146.920.000	2.053.553.810	95,65	4,35%
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100	75,84	75,84	36.684.394.430	34.619.687.960	94,37	5,63%
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan Persentase Ketercapaian Kegiatan Persentase pelaksanaan MRL	100	100	100	3.831.360.128	3.313.185.147	86,48	13,52%

2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	100	100	100	15.560.000	8.094.800	52,02	47,98%
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provins	100,00	55,85	55,85	25.977.560.372	24.896.439.708	95,84	4,16%
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	100	75	75,00	90.330.630	83.165.323	92,07	7,93%
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provin	100	50	50,00	216.304.000	111.991.324	51,77	48,23%
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100	50	50,00	4.550.357.300	4.351.060.977	95,62	4,38%

2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	100	100,00	2.002.922.000	1.855.750.681	92,65	7,35%
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran	100	100	100	543.674.972	393.791.248	72,43	27,57%
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	100	100	100,00	297.387.472	238.858.694	80,32	19,68%
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100	100	100,00	246.287.500	154.932.554	62,91	37,09%

2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian	100	100	100	484.526.100	437.741.111	90,34	9,66%
2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	100	100	100,00	484.526.100	437.741.111	90,34	9,66%
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN			100	100	100	5.448.499.000	4.688.221.634	86,05	13,95%
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100	100	100	4.486.092.000	3.788.464.441	84,45	15,55%
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	100	100	100,00	106.032.000	88.949.149	83,89	16,11%

2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	100	100	100	426.906.000	386.344.864	90,50	9,50%
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	100	100	100	3.757.078.000	3.124.128.628	83,15	16,85%
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	100	100	100	196.076.000	189.041.800	96,41	3,59%
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100	100	100	962.407.000	899.757.193	93,49	6,51%
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100	100	100	962.407.000	899.757.193	93,49	6,51%

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

**3.1.7. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN
KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Pada anggaran tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki 4 Program yang menjadi penunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 3. Program Pengelolaan Pelayaraan
- 4. Program Pengelolaan Perkeretaapian

untuk lebih jelas mengenai rincian program dan kegiatan yang menunjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13. Analisis Program Kegiatan Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Tujuan Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah						
	Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	100,97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,97	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100,00	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
					Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100,00	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	Menunjang
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	Menunjang
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	100,00	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100,00	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100,00	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Penyediaan Bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	100,00	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	Menunjang
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,00	Menunjang
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100,00	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,35	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95,38	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66,67	Menunjang
2	Tujuan Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Pertumbuhan ekonomi						
	Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Rasio Konektifitas Darat	92,68	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan	92,68	

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
					Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100,00	
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100,00	
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provins	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100,00	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provins	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100,00	
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provins	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	100,00	Menunjang
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	100,00	Menunjang
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	100,00	Menunjang
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	100,00	Menunjang
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	100,00	
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	100,00	Menunjang
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian, penertiban dan pengawasan	100,00	

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
					penyelenggaraan angkutan Persentase Ketercapaian Kegiatan Persentase pelaksanaan MRL d		
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	100,00	Menunjang
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	100,00	Menunjang
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	100,00	Menunjang
				Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	100,00	Menunjang
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	75,00	
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	100,00	Menunjang
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	100,00	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	0,00	Menunjang
				Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	0,00	Menunjang
				Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	100,00	Menunjang
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100,00	
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	100,00	Menunjang
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100,00	Menunjang
	Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Laut	Rasio Konektifitas Laut	100,00	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran	87,05	
				Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang	100,00	

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provins	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	100,00	Menunjang
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100,00	
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	100,00	Menunjang
	Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan Kereta Api	Cakupan Perlindungan Kereta Api yang Ditangani	100,00	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Presentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	100	
				Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	100,00	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
UPTD Pengelolaan Pelayanan Perhubungan							
1	Tujuan Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah						
	Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	98,43	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	98,43	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	100,00	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	100,00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
2	Tujuan Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Pertumbuhan ekonomi						
	Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Rasio Konektifitas Darat	127,73	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	127,73	
				Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	100,00	Menunjang

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Penyesuaian Strategi dan Kebijakan atas capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian indikator kinerja baik sasaran dan program seperti yang diuraikan, maka diperlukan beberapa penyesuaian atas strategi dan kebijakan organisasi. Penyesuaian strategi guna mencapai kebijakan pada tahun mendatang, sebagai berikut :

1. Penyesuaian aktivitas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan indikator kinerja sasaran dan program pada dokumen perencanaan kinerja;
2. Penyesuaian anggaran melalui evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama organisasi

Sedangkan dalam melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi yang telah direncanakan;
2. Komitmen dalam peningkatan kompetensi SDM agar mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai tupoksinya.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2025 memiliki anggaran murni sebesar Rp. 93,043,250,000,00 dimana sampai dengan bulan September 2025 realisasi keuangan mencapai Rp. 48.958.212.954,00 dengan prosentase capaian sebesar 55,69%.

Sementara untuk anggaran perubahan Dinas Perhubungan semula memiliki anggaran sebesar Rp. 93,043,250,000,00 menjadi Rp. 85,218,919,822,00 atau bertambah sebesar Rp. 6.625.463.276,00 dimana pada akhir penggaran perubahan 2025 realisasi keuangan mencapai Rp. 77.189.139.578,00 dengan prosentase capaian sebesar 90,52%.

Untuk lebih jelas mengenai realisasi anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Keuangan			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
INDUK									
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100	100	100,00	365.175.770	287.537.510	78,74	
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3,00	3,00	100,00	52.984.770	41.031.200	77,44	
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1,00	1,00	100,00	5.505.000	5.172.825	93,97	
2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1,00	1,00	100,00	5.505.000	5.505.000	100,00	
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1,00	1,00	100,00	5.505.000	1.946.025	35,35	
2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1,00	1,00	100,00	5.505.000	5.405.592	98,19	
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Laporan)	3,00	3,00	100,00	205.200.000	175.250.868	85,40	

2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6,00	6,00	100,00	84.971.000	53.226.000	62,64	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)			100,00	27.720.193.000	23.446.736.840	84,58	
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	96,00	96,00	100,00	26.721.990.000	22.964.011.060	85,94	
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12,00	12,00	100,00	885.950.000	391.030.000	44,14	
2.15.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12,00	12,00	100,00	63.005.000	59.669.996	94,71	
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1,00	1,00	100,00	798.000	798.000	100,00	
2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1,00	1,00	100,00	19.100.000	6.900.000	36,13	
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18,00	18,00	100,00	25.464.000	20.591.784	80,87	
2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1,00	1,00	100,00	3.886.000	3.736.000	96,14	
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)			100,00	30.100.000	20.675.790	68,69	

2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	1,00	100,00	30.100.000	20.675.790	68,69	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)			100,00	75.000.000	74.974.710	99,97	
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10,00	10,00	100,00	75.000.000	74.974.710	99,97	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)			100,00	617.516.000	546.677.927	88,53	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	100,00	50.000.000	48.423.500	96,85	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10,00	10,00	100,00	220.000.000	211.872.264	96,31	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3,00	3,00	100,00	100.000.000	94.525.000	94,53	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3,00	3,00	100,00	72.820.000	68.991.663	94,74	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12,00	12,00	100,00	105.000.000	59.216.200	56,40	
2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1,00	1,00	100,00	29.696.000	26.168.800	88,12	
2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1,00	1,00	100,00	40.000.000	37.480.500	93,70	

2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)			100,00	3.105.916.000	3.027.120.081	97,46	
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2,00	2,00	100,00	2.550.000.000	2.485.115.000	97,46	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	100,00	350.000.000	343.945.570	98,27	
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25,00	25,00	100,00	205.916.000	198.059.511	96,18	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)			100,00	7.997.004.550	7.592.420.957	94,94	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	100,00	852.523.200	657.086.237	77,08	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	100,00	7.144.481.350	6.935.334.720	97,07	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)			112,05	2.146.920.000	2.053.553.810	95,65	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	45,00	45,00	100,00	500.000.000	497.930.705	99,59	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30,00	30,00	100,00	1.046.920.000	1.035.917.800	98,95	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	110,00	108,00	98,18	100.000.000	92.801.736	92,80	
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4,00	6,00	150,00	500.000.000	426.903.569	85,38	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan Persentase Ketercapaian Kegiatan Persentase pelaksanaan MRLL d (Persen)			100,00	1.977.725.128	1.579.883.206	79,88	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Laporan)	4,00	4,00	100,00	1.977.725.128	1.579.883.206	79,88	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan Persentase Ketercapaian Kegiatan Persentase pelaksanaan MRLL d (Persen)			100,00	1.853.635.000	1.733.301.941	93,51	
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	1,00	1,00	100,00	4.000.000	-	0,00	

2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	1,00	1,00	100,00	50.000	-	0,00	
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan (Unit)	300,00	300,00	100,00	1.849.585.000	1.733.301.941	93,71	
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi (%)			100,00	15.560.000	8.094.800	52,02	
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	1,00	1,00	100,00	10.000.000	5.664.800	56,65	
2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	1,00	1,00	100,00	5.560.000	2.430.000	43,71	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Persen)			100,00	25.977.560.372	24.896.439.708	95,84	
2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun (Unit)	9,00	9,00	100,00	2.678.146.000	2.547.984.468	95,14	
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	1.330,00	1.330,00	100,00	22.560.248.000	21.661.311.550	96,02	
2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	8,00	8,00	100,00	305.130.000	295.829.090	96,95	
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	62,00	62,00	100,00	434.036.372	391.314.600	90,16	
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Persen)			100,00	90.330.630	83.165.323	92,07	

2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)	1,00	1,00	100,00	90.330.630	83.165.323	92,07	
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provin (Persen)			50,00	216.304.000	111.991.324	51,77	
2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00	120.388.000	98.311.324	81,66	
2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Dokumen)	1,00	0,00	0,00	95.916.000	13.680.000	14,26	
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (Persen)			60,00	4.550.357.300	4.351.060.977	95,62	
2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)	1,00	1,00	100,00	52.476.800	14.299.621	27,25	
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	1,00	1,00	100,00	5.000.000	4.453.621	89,07	
2.15.02.1.07.0007	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	1,00	0,00	0,00	40.053.000	37.068.500	92,55	

2.15.02.1.07.0008	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Dokumen)	1,00	0,00	0,00	5.000.000	4.533.621	90,67	
2.15.02.1.07.0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Lokasi)	15,00	15,00	100,00	4.447.827.500	4.290.705.614	96,47	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Persen)			100,00	2.002.922.000	1.855.750.681	92,65	
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	3,00	3,00	100,00	2.000.752.000	1.853.822.211	92,66	
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	100,00	100,00	100,00	2.170.000	1.928.470	88,87	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (Persen)			100,00	246.287.500	154.932.554	62,91	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian (Unit)	1,00	1,00	100,00	246.287.500	154.932.554	62,91	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	- (Persen)			100,00	297.387.472	238.858.694	80,32	
2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi (Laporan)	3,00	3,00	100,00	297.387.472	238.858.694	80,32	
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN								
2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Presentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi (Persen)			100,00	484.526.100	437.741.111	90,34	
2.15.05.1.06.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan (Dokumen)	4,00	4,00	100,00	484.526.100	437.741.111	90,34	
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					3.886.000	7.147.200	183,92	

2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan) (Persen)			100,00	106.032.000	88.949.149	83,89	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	100,00	10.130.000	9.831.825	97,06	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	5,00	100,00	50.000.000	45.881.779	91,76	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4,00	4,00	100,00	15.000.000	13.496.690	89,98	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1,00	1,00	100,00	30.902.000	19.738.855	63,88	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)			100,00	426.906.000	386.344.864	90,50	
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	1,00	100,00	426.906.000	386.344.864	90,50	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan) (Persen)			100,00	3.757.078.000	3.125.028.628	83,18	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	100,00	3.684.978.000	3.067.007.028	83,23	

2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	11,00	11,00	100,00	72.100.000	58.021.600	80,47	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)			100,00	196.076.000	189.041.800	96,41	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9,00	9,00	100,00	174.310.000	168.694.000	96,78	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	26,00	26,00	100,00	21.766.000	20.347.800	93,48	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Persen)			100,00	962.407.000	900.357.193	93,55	
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	90,00	90,00	100,00	962.407.000	900.357.193	93,55	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESEMPULAN

Dari akuntabilitas kinerja pada BAB III dapat disimpulkan bahwa Dinas Pehugungan Provinsi Banten memiliki 4 (empat) program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 64 (Enam puluh empat) Sub Kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Capaaian Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja dari 3 indikator kinerja yang telah di tetapkan pada tahun 2025 diperoleh beberapa nilai capaian sebagaimana penjelasan di bawah ini.

1. Capaian indikator Rasio Konektivitas Darat Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki target sebesar 0,70 satuan nilai, realisasi sebesar 65,00 satuan nilai dengan capain sebesar 92,86 persen.
2. Capaian indikator Rasio Konektivitas Laut memiliki target sebesar 10 satuan nilai, realisasi sebesar 10 satuan nilai dengan capaian 100 persen.
3. Capaian indikator Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani memiliki target sebesar 100 satuan nilai, realisasi sebesar 100 satuan nilai dengan capaian 100 persen.

B. Realisasi Anggaran

Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2025 memiliki anggaran murni sebesar Rp. 93,043,250,000,00 dimana sampai dengan bulan September 2025 realisasi keuangan mencapai Rp. 50.083.812.860,00 dengan prosentase capaian sebesar 58,77%.

Sementara untuk anggaran perubahan Dinas Perhubungan semula memiliki anggaran sebesar Rp. 93.043.250.000,00 menjadi Rp. 85.218.919.822,00 atau berkurang sebesar Rp. 7.824.330.178,00 dimana pada akhir penggaran perubahan 2025 realisasi keuangan mencapai Rp. 77.190.639.579,00 dengan prosentase capaian sebesar 90,58%.

4.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pehubungan tahun 2025 terdapat beberapa permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan penyusunanya oleh kerena itu perlu diusulkan beberapa rekomendasi sebagai bahan evaluasi penyusunan lapaoran selanjutya.

1. Sebelum penyususnan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) ini perlu dilakukan rapat pada setiap bidang untuk menyampaikan progres capaian program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan laporan ini.
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan gaambaran secara teknis tata cara penyunan LKjIP.
3. Melakukan *Update* data untuk mendapatkan informasi terbaru agar dalam penyusunan LKjIP dapat lebih akurat.
4. Melakukan evaluasi internal sebelum laporan ini disampaikan pada instansi berwenang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan Penyusunan LKjIP ini.

LAMPIRAN 1



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 26704
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB) PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 24 Februari 2026
Inspektur Daerah,



Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681012 198803 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. DAMENTA**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,


A. DAMENTA

Pihak Pertama,


TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 199003 1 003

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN**DPA TA-2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan, Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Keselamatan Perhubungan	Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,74
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	19,30
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	84

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	93.043.250.000
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.563.541.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	41.913.566.630
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	841.512.000
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	724.630.370
	JUMLAH	93.043.250.000

Pj. GUBERNUR BANTEN,
A. DAMENTA**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,****TRI NURTOPO, MT**
NIP. 19660530 199003 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI NURTOPO, M.T.**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRA SONI**

Jabatan : **GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

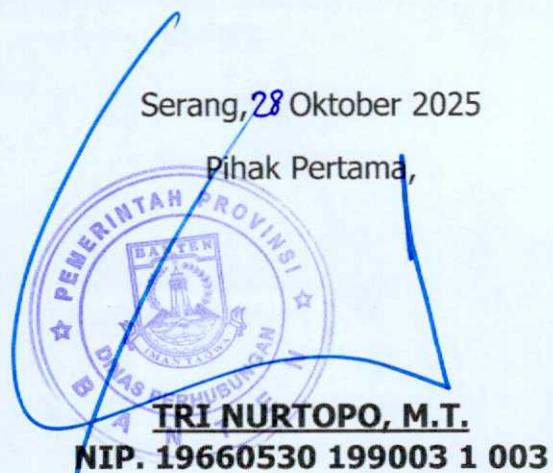
Pihak Kedua,



ANDRA SONI

Serang, 28 Oktober 2025

Pihak Pertama,



TRI NURTOPO, M.T.
NIP. 19660530 199003 1 003

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

DPPA TA-2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat	Rasio	0,70
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut	Unit	10
3	Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Persentase	100

BELANJA DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	85.218.919.822	PAPBD
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.543.917.320	PAPBD
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	37.646.801.430	PAPBD
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	543.674.972	PAPBD
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	484.526.100	PAPBD
	JUMLAH	85.218.919.822	

GUBERNUR BANTEN,**ANDRA SONI****KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,****TRI NURTOPO, M.T.****NIP. 19660530 199003 1 003**